

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH,  
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
TERHADAP KUALITAS INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)**

**Oleh :**

**Audiana Putri**

**Pembimbing : Desmiyawati dan Al Azhar A**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : audianaputri@yahoo.com*

*The Influence of Implementing Financial Information System, Implementing Accounting Government Standard, and Utilization of Information Technology to The Quality Of Information Financial Reporting*

**ABSTRACT**

*The research aims to analyze of influencing implementing financial information system, implementing accounting government standard and utilization of information technology to the quality of information financial reporting. Object of this research is department of SKPD Kuantan Singingi. There are eighty one questionnaires were sent, and eighty one questionnaires are returned. That data are analyzed by linear regression method and SPSS program version 19. The variables were examined implementing financial information system, implementing accounting government standard and utilization of information technology to the quality of information financial reporting. The results of this research showed implementing financial information system has an effect to the quality of information financial reporting with 0,001 significance, implementing accounting government standard has an effect to the quality of information financial reporting with 0,003 significance and utilization of information technology has an effect to the quality of information financial reporting with 0,001 significance. The results of this research also showed that coefficient R square is 75,8%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independents variables could explain dependent variable well.. All variables also have strong relation with variable dependents in this research.*

*Keywords: information, financial, accounting, government and quality*

**PENDAHULUAN**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta

memprediksi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan daerah.

Tujuan penting adanya penyajian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi pemerintahan juga memiliki peran sangat penting untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terkait dengan tugas tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada para pemakai laporan keuangan.

Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi tersebut merupakan salah satu tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik (Tri Hapsari, 2004). Bentuk pertanggungjawaban ini untuk menilai apakah pemerintah telah meningkatkan kualitas, profesionalisme dan peranannya dalam menjalankan aktifitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas penyajiannya yang

dipengaruhi oleh faktor Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mengalami perubahan eksternal dan tidak dapat dikendalikan oleh perubahan organisasi.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD keuangan daerah, laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi yang berkualitas mengingat peranannya dalam pengambilan keputusan untuk tiap daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah yang harus disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Telah diketahui bahwa banyaknya pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan suatu keputusan dan kebutuhan para pemakai, serta keyakinan pemakai terhadap informasi tersebut.

Adapun karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi untuk memiliki kualitas informasi menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah yaitu ; relevan yang artinya informasi memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi pengambilan keputusan ; andal yaitu informasi disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan dapat menyalurkan pemahaman informasi terhadap pengguna laporan keuangan ; dapat dibandingkan yaitu informasi dapat dijadikan acuan penyusunan antar periode maupun antar entitas ; dapat dipahami yaitu informasi mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan oleh kemampuan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.

Semua informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah dan sudah memenuhi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila tiap pemerintah daerah tidak menerapkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah maka akan mengakibatkan adanya kerugian, kelemahan pengendalian internal, ketidak efektifan, dan ketidak efisienan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah penerapan sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi memiliki peranan penting dalam menjalankan kualitas kinerja organisasi. Penerapan sistem informasi keuangan daerah akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menerapkan sistem informasi keuangan daerah, diperlukan adanya kerjasama dari pihak pemerintah untuk menyajikan informasi laporan keuangan yang memiliki keakuratan yang tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data dan bukti transaksi pemerintahan, mengelola, dan menyediakan informasi keuangan daerah terhadap para pengguna laporan keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah memberi manfaat atau kemudahan dalam mengelola, mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Fikri, 2011).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PSAP, 2010).

Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah, aparatur sebagai pihak penyaji laporan keuangan memiliki pedoman yang pasti dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan mampu menyediakan informasi pelaporan yang berkualitas. Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan penting dalam menjalankan sistem informasi sehingga peranannya yang memadai harus didukung seperti tersedianya perangkat komputer baik hardware maupun software yang mampu menghasilkan informasi, berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Jika ditinjau dari total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah diatur menurut PP Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan untuk meningkatkan kemajuan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kerja

keras Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membenah laporan keuangan yang masih mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada penurunan dibandingkan 2013 lalu yang memperoleh opini WTP. Opini WTP dengan paragraf penjelasan, yang diterima pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dikarenakan masih ada yang perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi yang belum dipaparkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan melalui PP No. 71 Tahun 2010.

Hal terkait lainnya dengan fenomena diatas, melibatkan kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu kabupaten yang tersangkut masalah tentang pemborosan anggaran yang terjadi di pembangunan tiga pilar Kuantan Singingi pada APBD tahun 2014. Permasalahan ini sudah ditindak lanjuti oleh keputusan Kejaksaan Agung. Pemborosan anggaran ini merupakan informasi yang diperoleh atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah pada kabupaten Kuantan Singingi menjadi tidak relevan dikarenakan informasi didalam laporan keuangan sudah memberikan informasi yang menyedatkan akibat adanya tindakan penyalahgunaan

anggaran di laporan keuangan pemerintah yang tidak bertanggungjawab.

Kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah pada kabupaten Kuantan Singingi juga dapat dilihat melalui permasalahan yang terjadi pada penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh salah satu SKPD pada tahun 2014. Penyalahgunaan keuangan yang dilakukan ini tidak dapat menggambarkan informasi pelaporan keuangan yang berkualitas, karena tidak memenuhi unsur relevan dan andalnya pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu kabupaten Kuantan Singingi belum mampu menyajikan transaksi dan informasi yang sesuai dengan bukti yang ada akibat adanya penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh aparaturnya (Sumber: bpk.go.id).

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah

terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan**

Dalam sebuah organisasi pemerintahan kewajiban membuat laporan keuangan yang berkualitas adalah sebuah keharusan, karena laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan pada kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang tujuan penyusunan laporan keuangan pada paragraf 23 disebutkan bahwa pelaporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatan

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang mengalami kenaikan atau penurunan selama periode berjalan.

Di dalam peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 juga mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Nordiawan, *et al.* (2009:151) mengartikan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

### **Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah proses menerapkan prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyampaian informasi terhadap para pengguna laporan keuangan sebagai bentuk dan hasil akhir dari penerapan system informasi keuangan daerah (Kurnia, 2013).

Menurut Mardiasmo (2004:34) menyatakan tentang sistem informasi keuangan daerah didefinisikan sebagai Alat yang digunakan sebagai pengembangan, pendendalian dan memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan organisasi

sehingga dapat diambil keputusan yang andal dan relevan.

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi merupakan salah satu integrasi dari berbagai macam proses atas transaksi yang berasal dari berbagai fungsi dan organisasi. Menurut Kurnia (2013), menyebutkan bahwa penerapan system informasi keuangan terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum. Penerapan tersebut perlu diperhatikan, guna penyusunan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang telah disusun sedemikian rupa, agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus menerus terhadap pelaksanaan dengan tujuan agar dapat diketahui kepatuhan dari penerapan standar akuntansi pemerintah.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal (Mardiasmo, 2006:71). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam

perhitungan daripada menggunakan sistem manual.

Menurut Hamzah (2009:71) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki indikasi dapat dimanfaatkan apabila mencakup adanya:

- a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah pemerintah daerah

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dilakukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan hingga penyampaian

informasi yang melibatkan seluruh input berupa data transaksi yang telah diolah melalui sebuah sistem dan menjadikan hasil output yang berkualitas (Kartika, 2013). Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah menjadi salah satu acuan untuk menilai apakah proses penyusunan laporan keuangan dapat menggambarkan informasi yang sesuai serta mampu menguraikan apa yang terjadi dan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna.

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat diciptakan, apabila pemerintah dapat menekan kelemahan yang timbul selama penyajian laporan keuangan. Salah satu kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terletak pada ketidakmampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan, sehingga menimbulkan banyak data yang tidak akurat dalam proses akuntansi yang menghasilkan LKPD. Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak data penting yang hilang.

**H1:** Diduga penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu proses menerapkan prinsip-prinsip sebagai bahan acuan dan

persyaratan dalam penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan serta bermanfaat, karena aparatur pemerintah diberikan pedoman dalam mengkomunikasikan informasi yang sudah memiliki aturan teknis (Aspar, 2014).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis accrual akan memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan ataupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah karena salah satu prinsip akuntansi yang harus diterapkan bahwa biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Yelvi, 2010). Penerapan standar akuntansi pemerintah diciptakan melalui beberapa prinsip yang digunakan oleh aparatur dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip akuntansi yang dimaksud dalam penerapan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip kewajaran, prinsip keterbandingan, prinsip nilai, prinsip manfaat, prinsip biaya, dan prinsip going concern (Suwardjono, 2010).

**H2:** Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya

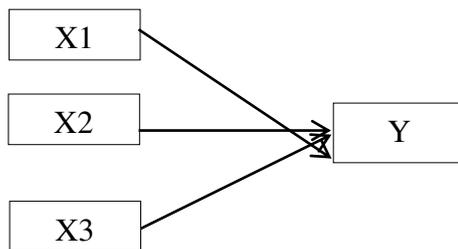
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di setiap daerah (Hamzah, 2009). Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, digunakan untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Penyederhanaan ini dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang mengandung unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para penggunanya.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan yang diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**H3:** Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan

### Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:



**Sumber:** *Data Olahan, 2016*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Bendahara. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap – tiap pihak tersebut memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 78

responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan kuesioner kepada SKPD.

### Metode Analisis Data

#### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang

mendekati distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya dengan memperhatikan nilai yang ada didalam plot.

#### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika  $VIF > 10$  dan nilai  $Tolerance < 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

#### **Analisis Regresi Berganda**

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki

lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

#### **Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis**

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

#### **Definisi Operasionalisasi Variabel**

Kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Putra (2013), yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah proses menerapkan prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyampaian informasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan penerapan prinsip-prinsip dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari pusat dan daerah untuk menyatakan adanya prinsip kewajaran, prinsip keterbandingan, prinsip nilai, prinsip manfaat, prinsip biaya, dan prinsip *going concern*.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaa secara optimal perangkat lunak, jaringan, database, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05. Berikut ini adalah tabel yang disajikan dalam uji validitas dan reliabilitas

### Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas 709nstrument penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data**

No	Variabel	Nilai Cronbach	Nilai Validitas
1	Y	0,775	0.000
2	X1	0,695	0.000
3	X2	0,758	0.000
4	X3	0,682	0.000

Sumber : Data Olahan, 2016

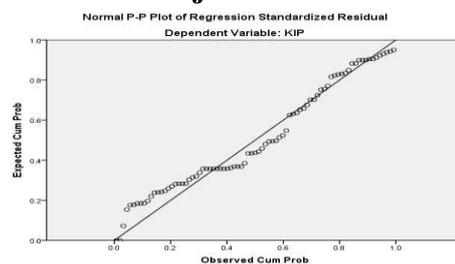
### Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam graifik P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar penelitian ini untuk menunjukkan normalitas data dari suatu penelitian.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data Olahan, 2016

### Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peengganggu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari mutikolonieritas didalam penelitian. Uji multikolonieritas digunakan untuk varians data. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

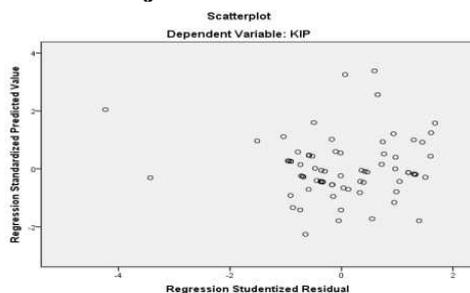
Variabel	Tolerance	VIF
X1	.767	1.304
X2	.762	1.313
X3	.805	1.243

Sumber : Data Olahan, 2016

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y.

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data Olahan, 2016

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur peengaruh atau tidaknya:

$$Y = 5,640 + 0,326X1 + 0,041X2 + 0,150X3 + e$$

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,640. Artinya adalah apabila variabel penerapan sistem informasi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi diasumsikan nol (0), maka kualitas informasi pelaporan keuangan sebesar 5,640.
- Nilai koefisien regresi penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,326. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan sistem informasi keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan sebesar 0,326.
- Nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,041. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan sebesar 0,041.
- Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,150. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan sebesar 0,150.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>1</sub>

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.11 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai 3,333. Nilai  $t$  tabel sebesar 1,990, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai  $df$  sebesar 78 ( $n$ -banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013). Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} 3,333 > t_{tabel} 1,990$ . Maka dapat disimpulkan **H<sub>1</sub> diterima** yaitu penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.11 didapat  $P$  value 0,001 yang berarti  $P$  value  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>2</sub>

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.11 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai 2,465. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} 2,465 > t_{tabel} 1,990$ . Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan **H<sub>2</sub> diterima** yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.11 didapat  $P$  value 0,003 yang berarti  $P$  value  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>3</sub>

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.11 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai 2,858. Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} 2,858 > t_{tabel} 1,990$ . Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan **H<sub>3</sub> diterima** yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam tabel 4.11 didapat  $P$  value 0,001 yang berarti  $P$  value  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa aparat pemerintah yang

menerapkan sistem informasi keuangan daerah akan mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti staf aparatur pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku akan mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menyajikan laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan

sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

- 2) Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas. Penelitian diharapkan untuk tidak meneliti pada SKPD yang sudah diteliti, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Provinsi Riau, sehingga wilayah penelitian lebih dapat digeneralisasikan.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan pemahaman akuntansi dan kualitas sumber daya manusia dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aspar. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Fikri Miftahul. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIE. Palembang.

- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kerja dan Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten Pulau Madura). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kartika, Indriya. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kurnia, Famela. 2013. Pengaruh kompetensi Staff dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal telaah riset akuntansi dan manajemen
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddy. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta
- Yelvi. 2010. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Islam Riau